

Journal  
**JURNAL PENELITIAN**  
**ILMU-ILMU KEISLAMAN**

Kelembagaan dan Fondasional Integrasi Keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim  
Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya  
M. Mubandus Salamah Zainiyati

Kelembagaan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam terhadap LGBT  
dari Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin  
Muhammad Azarrin al-Hamidy

Kelembagaan dan Tradisi Islam Lokal K.H. Shalih Darat  
Muhammad Mas'ud

Kelembagaan dan Eksistensi Dakwah Tarekat Siddiqiyah di Tengah Masyarakat Urban Surabaya  
Muhammad Shodiq

Kelembagaan dan Implikasinya dalam Penciptaan Kohesi Damai  
Antarumat Beragama  
Muhammad Hidayat Wakhid Udin

Kelembagaan dan Konsep Tafsir Sa'îd Hawwâ dalam *al-Asâs fî al-Tafsîr*  
Muhammad Rosyadi

Kelembagaan dan Narasi Kekerasan: Analisa Normatif-Medis Penerapan  
Kelembagaan Perempuan  
Muhammad Zamzami

Kelembagaan dan Tanggapan terhadap Dialektika Akademik Islam dan Barat  
Muhammad Hamim

Kelembagaan dan Perilaku Berbasis Harmoni Sosial dan Implementasi  
*Service Learning* Matakuliah Psikologi Agama  
Muhammad Setiyani

Kelembagaan dan Empowering Usaha Kreatif untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri  
Berbasis Shari'ah di Pesantren Mambaus Sholihin  
Muhammad Mahzumi

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

## Daftar Isi

- 249-277 Landasan Fondasional Integrasi Keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sunan Ampel Surabaya—Husniyatus Salamah Zainiyati
- 278-301 Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam terhadap LGBT Perspektif *Human Dignity* Mashood A. Baderin—Abu Dzarrin al-Hamidy
- 302-321 Sufisme dan Tradisi Islam Lokal K.H. Shalih Darat—Ali Mas'ud
- 322-351 Eksistensi Dakwah Tarekat *Şiddiqiyah* di Tengah Masyarakat Urban Surabaya—Muhammad Shodiq
- 352-373 *Trust Clause* dan Implikasinya dalam Penciptaan Kohesi Damai Antarumat Beragama—Nur Hidayat Wakhid Udin
- 374-406 Konsep Tafsir Sa'Id Hawwâ dalam *al-Asis fi al-Tafsir*—Imron Rosyadi
- 407-435 Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisa Normatif-Medis Penerapan Sirkumsisi Perempuan—Mukhammad Zamzami
- 436-460 Kritik dan Tanggapan terhadap Dialektika Akademik Islam dan Barat—Thoha Hamim
- 461-484 Agama sebagai Perilaku Berbasis Harmoni Sosial dan Implementasi *Service Learning* Matakuliah Psikologi Agama—Wiwik Setiyani
- 485-516 *Empowering* Usaha Kreatif untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Syariah di Pesantren Mambaus Sholihin—Fikri Mahzumi

**EMPOWERING USAHA KREATIF  
UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI MANDIRI BERBASIS  
SHAR'AH DI PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN**

Fikri Mahzumi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: fikrimuz@gmail.com

**Abstract:** In fact Islamic boarding schools are potential institutions to grow up into a kind of public economy. Therefore it needs accurate analyzing of carry out the economy empowering. The last target of economic empowering of Islamic boarding schools is their own independence. As the time goes by, Islamic boarding schools are always labelled as aid proposal agent. They would be relieved from that problem while their economic condition is getting stronger. The writer has conducted exploratory study to preserve valuable heritage of Mambaus Sholihin Moslem Scholars, and to promote the heritage in ecomic system so that it can exist in the age of advanced development. After a dialogue with the local people, and the stakeholder of Mambaus Sholihin islamic boarding school, it can be concluded that the boarding school needs to perform empowerment on some aspects, especially in economic aspects, using Islamic Economy System as basic structure of developing. i.e.: holding training entitled "Empowering Economy of Islamic Boarding School Based on Sharia", reconstructing management organization in economic roles, improving economic infrastructures, and establishing Bayt al-Mal wa Tamwil (BMT).

**Keywords:** Boarding school; empowerment; participatory study.

**Pendahuluan**

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional<sup>1</sup> Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan

<sup>1</sup> Kata "tradisional" dalam batasan tidak merujuk dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian, tetapi merujuk pada lembaga ini yang berkembang sejak ratusan yang lalu (300-400) yang merupakan suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa.

mengamalkan ajaran Islam dengan memekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Perkembangan selanjutnya, pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, kemasyarakatan saja tetapi juga berperan sebagai pengembangan masyarakat (*community development*), perubahan sosial (*agent of change*), dan pembebasan (*liberation*) pada masyarakat dari ketertindasan, keburukan moral, politik, kemiskinan.

Farchan, menjelaskan bahwa pembaruan dalam pondok pesantren secara teologis sebenarnya telah diajarkan oleh pondok pesantren dengan istilah *al-Mubafadzotuz Ala al-Qodim al-shalih, Wal-ahdzu bil-Jadid al-Ashlah* (melestarikan nilai-nilai tradisi lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai tradisi baru yang baik). Akan tetapi dalam kenyataannya dasar teologis ini hanya sebagian pondok pesantren saja yang melaksanakannya.

Sedangkan DEPAG, menyatakan bahwa ada tiga faktor yang berperan dalam sistem penyelenggaraan pondok pesantren yaitu: 1) manajemen sebagai faktor upaya, 2) organisasi sebagai faktor sarana, dan 3) administrasi sebagai faktor kuasa. Oleh karena itu keberadaan faktor-faktor ini memberikan arah perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan pondok pesantren.

Penerapan otonomi daerah yang diikuti dengan penerapan penerapan otonomi pada lembaga pendidikan merupakan kesempatan pada masing-masing lembaga pendidikan untuk memajukan lembaganya termasuk pondok pesantren karena dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dinyatakan bahwa:

1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan agama berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau/menjadi ahli agama.
3. Pendidikan agama dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.
4. Pendidikan keagamaan berbentuk ajaran diniyah pesantren, pasraman, abhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis,

5. Ketantuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat, (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kenyataan di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan pondok pesantren harus melakukan inovasi-inovasi dalam lembaga, karena dalam konteks otonomi pendidikan kamandirian lembaga merupakan hal yang penting termasuk dalam pendanaan pendidikan. Pendanaan dalam lembaga pendidikan menurut Anwar ada empat permasalahan yang di hadapi oleh lembaga pendidikan yaitu: 1) Kemampuan manajemen, 2) Peningkatan kualitas 3) Kesenambungan, dan 4) Akuntabilitas.

Permasalahan dana dalam lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren, menurut Manfred Oepen dapat diatasi dengan cara: mengadopsi manajemen modern, membuat wirausaha, melakukan pelatihan kewirausahaan, membuat *network* ekonomi, dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Perkoprasian (*precooperative movement*), dan pengembangan industri kecil (*small bussines development*) yang dapat meningkatkan pendapatan (*income generating program*).

Terkait dengan kemandirian pesantren, dewasa ini banyak pesantren-pesantren yang telah melakukan pengembangan internal yang memungkinkan besarnya peluang pondok pesantren untuk berperan sebagai agen pembangunan dalam rangka menjembatani dan memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Pondok pesantren dipandang memiliki potensi besar dalam pembangunan dalam bidang ekonomi dengan pertimbangan potensi perekonomian yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Alam (SDA), selain itu keberadaan tenaga-tenaga muda di pesantren merupakan SDM yang potensial tidak hanya dalam menyebarkan ilmu agama (dakwah) namun juga berpotensi sebagai penggerak usaha dalam bidang perekonomian yang handal dan tentu inovatif juga pasar (santri, alumni dan masyarakat sekitar pesantren). Pemanfaatan potensi-potensi ini harus direncanakan dengan baik melalui penyiapan SDM yang memiliki motivasi, wawasan metodologis disamping aspek pendanaan dan perlengkapan lainnya. Meskipun menurut Didin Hafidhuddin, "yang sudah mandiri baru berjumlah sekitar ratusan dari 27 ribu pesantren yang ada di seluruh Indonesia". Bahkan dewasa ini, kesadaran akan pentingnya pemberdayaan pesantren dengan mengandalkan potensi yang dimiliki semakin gencar dipromosikan, terutama terkait dengan pengembangan ekonomi shari'ah. Seperti yang baru-baru digagas oleh

Kementerian Agama bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) di Surabaya.

Salah satu pondok pesantren yang melakukan pengembangan internal untuk mewujudkan kemandirian pondok pesantren dalam manajemen dan finansial adalah Pondok Pesantren Mambaus Sholihin (PPMS) Suci Manyar Gresik. Meskipun pondok pesantren ini masih berjalan satu periode kepemimpinan, yaitu di bawah asuhan KH. Masbuhin Faqih sejak didirikan pada tahun 1976. Namun dari sisi pengembangan ekonomi mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang dibuktikan dengan didirikannya beberapa unit usaha bidang perekonomian di PPMS ini, termasuk Koperasi Pesantren. Dan seiring berjalannya waktu unit-unit usaha tersebut semakin bertambah, terakhir pada tahun 2014 dengan melihat prospek jasa travel dan tren pasar di Gresik terkait pelaksanaan ibadah umroh, pesantren bekerjasama dengan perusahaan yang sudah memiliki pengalaman dalam pelayanan jasa perjalanan umroh dan haji, mendirikan unit usaha travel yang diberi nama "MBS Travel". Selain perkembangan dalam bidang perekonomian yang menjadi fokus dari penelitian partisipatif ini, PPMS termasuk pesantren yang sangat berkembang dalam bidang pendidikan formal. Tercatat dalam tahun 2014 lembaga pendidikan formal yang secara resmi dikelola oleh PPMS mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi, serta tidak kurang dari 5000 santri yang menetap di PPMS yang tersebar di semua tingkatan lembaga pendidikan formal.

Selain itu, PPMS juga sudah merancang untuk mengembangkan sayap dakwahnya dengan mendirikan cabang-cabang PPMS. Pada tahun 2014 ini, PPMS sudah memiliki beberapa cabang di luar wilayah pondok induk, yakni kabupaten Gresik seperti di Blitar, Ambon, Bali dan Bintan Kepulauan Riau. Melihat pada kondisi PPMS dengan berbagai potensi strategis, baik sektor pendidikan dan ekonomi yang dimiliki dan telah secara singkat dipaparkan oleh peneliti, PPMS dalam pandangan peneliti layak untuk menjadi lokomotif ekonomi shari'ah yang diharapkan dapat menjalankan peran yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menarik mengingat perkembangan ekonomi shari'ah di Indonesia yang menemukan momentumnya pada era dewasa ini. Terbukti semakin maraknya bank-bank shari'ah yang didirikan dan jasa keuangan berbasis shari'ah yang mendapatkan perhatian di tengah masyarakat Indonesia, khususnya Gresik yang notabene mayoritas Muslim. Sekaligus

pertimbangan bahwa pesantren merupakan basis dan subjek dari shari'ah itu sendiri. Potensi ekonomi pesantren berbasis shari'ah ini selaras dengan apa yang telah diungkapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam memetakan tiga trilogi pesantren sebagai bekal potensi pengembangan ekonominya yaitu dari segi pola pendidikan, aspek keagamaan dan aspek sosial.

Dari deskripsi di atas, peneliti menangkap peluang pemberdayaan yang dapat dilakukan di PPMS Gresik dalam konteks pengembangan usaha kreatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis shari'ah. Mengingat dalam observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap usaha-usaha bidang perekonomian yang di PPMS, ditemukan fakta lapangan bahwa manajemen yang dijalankan untuk mengelola unit-unit usaha masih dikategorikan ke dalam manajemen tradisional. Selain itu tidak ada *framework* yang terbakukan terkait konsep ekonomi berbasis shari'ah, meskipun *mu'amalah* yang dilakukan selama ini dalam rel shari'ah. Paling tidak dari fakta yang ditemukan di lapangan, oleh peneliti pemberdayaan yang akan dilakukan di PPMS terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan konsep manajemen ekonomi berbasis shari'ah kepada *stakeholders* beserta peluang-peluangnya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di PPMS.
2. Memperbaiki tata organisasi bidang perekonomian yang selama ini kurang tertata dengan baik.
3. Mengembangkan peran koperasi pesantren sebagai induk unit-unit usaha bidang perekonomian.
4. Memunculkan potensi-potensi baru dalam pengembangan perekonomian.

#### Letak Geografis Pondok Pesantren Mambaus Sholihin

Pondok Pesantren Mambaus Sholihin (PPMS) adalah sebuah institusi yang terletak di kawasan pegunungan Suci, bersuhu udara cukup hangat,  $\pm 25$  °C. Kawasan ini berada kurang lebih 3 Km dari terminal Bunder (jalur utama Surabaya-Jakarta). Dan 2 Km dari Pertigaan Desa Tenger Sukomulyo yang terletak di jalur pantura ini termasuk kawasan yang cukup makmur ekonominya. Dengan sumber daya alamnya serta pasokan air yang melimpah ruah merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat sekitar dan juga bagi Pesantren.

PPMS dirintis oleh ayahanda KH. Masbuhin Faqih, yaitu Al Maghfurlah Al Mukarrom KH. Abdullah Faqih Suci sekitar tahun 1969 yang pada mulanya berupa surau kecil untuk mengaji al-Qur'an dan Kitab Kuning di lingkungan desa Suci dan sekitarnya. Berkat dorongan dari guru-guru beliau yaitu KH. Abdul Hadi Zahid, KH. Abdullah Faqih Langitan, KH. Abdul Hamid Pasuruan, KH. Usman Al-Ishaqi, serta keinginan luhur beliau untuk Nasrul Ilmi, maka didirikanlah sebuah pesantren yang kelak bernama Mambaus Sholihin. Adapun dana pertama kali yang digunakan untuk membangun pondok adalah pemberian guru beliau, KH. Abdullah Faqih Langitan. Pada saat pendirian Pesantren, KH. Masbuhin Faqih masih menimba serta mendalami ilmu di Pondok Pesantren Langitan.

Pada tahun 1402 H atau tepatnya pada tahun 1983 M, barulah dilakukan pembangunan Musholla PPMS. Pada pembangunan Tahap selanjutnya, KH. Agus Ali Masyhuri (Tulangan Sidoarjo) membeli sepetak tanah yang baru dibelinya dari salah seorang anggota Darul Hadits, yang kemudian tanah yang terletak disebelah Masjid Jami' Suci "Roudhotus Salam" itu menjadi bakal dari Pesantren Putra Mambaus Sholihin. Dan pada sekarang ini tercatat +-5000 santri yang bermukim di PPMS.

PPMS mengadopsi perpaduan sistem Salaf-Modern ini mengusung berbagai format dan materi dalam sistem pengajarannya. Kurikulum yang dikembangkan di PPMS merupakan perpaduan antara tiga Pondok Pesantren yang menjadi kiblat aktivitas keseharian di Mambaus Sholihin, ketiga Pesantren tersebut antara lain; a. Pondok Modern Gontor. Merupakan kiblat Mambaus Sholihin dalam hal Penguasaan Bahasa Arab dan Inggris dan organisasi. b. Pondok Pesantren Langitan sebagai kiblat Mambaus Sholihin dalam hal kurikulum Salafiyah, dan c. Pondok Pesantren Roudhotul Muta'allimin Sawahpolo Surabaya dalam hal Ubudiyahnya.

Adapun lembaga pendidikan yang dimiliki dan dikembangkan sampai saat ini adalah sebagai berikut: a. Madrasah Ibtidaiyah, b. Madrasah Tsanawiyah, c. Madrasah Aliyah, yang semuanya berstatus Terakreditasi A. dan d. Institut Keislaman Abdulloh Faqih (INKAFA) yang diresmikan pada tanggal 30 Juni 2003 oleh Dr. H. Qodri Azizi. M.Ag (Dirjen Pendis Depag RI) didampingi Rektor IAIN Surabaya Dr. H. Ridwan Natsir M.A, dan juga bertepatan dengan Akhiris Sanah PPMS Tahun Pelajaran 2002/2003. dan untuk penunjang pendidikan

keagamaan juga terdapat Madrasah diniyah dari tingkat Ula (awal), Wustho (Menengah) dan Ulya (Atas).

Usaha-usaha Bidang Sosial dan Perekonomian di PPMS, antara lain:

*Pertama*, Klinik Umum DAR AL SYIFA'. Sebagai salah satu peningkatan kepedulian terhadap masalah kesehatan khususnya bagi santri dan umumnya bagi masyarakat sekitarnya, maka PPMS membangun sebuah sarana peningkatan kesehatan yang diberi nama klinik umum Dar al Syifa'. Klinik Kesehatan ini berdiri pada tanggal 3 November 2002, dan baru diresmikan oleh bupati Gresik saat itu, Drs. K.H Robbach Ma'shum MM pada tanggal 13 Maret 2004.

*Kedua*, Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN). Usaha ini didirikan pada tahun 1998 di saat bangsa Indonesia mulai memasuki krisis perekonomian. Dengan modal awal pendirian sebesar Rp. 5.000.000,- dan rumah sewaan, Kopontren ini mulai beroperasi. Setapak demi setapak Kopontren Mambaus Sholihin mulai mengalami kemajuan, dan setelah enam tahun bergelut di bidang Bisnis dan Perdagangan, kini Kopontren Induk Mambaus Sholihin berhasil mengepaskan sayapnya, dengan membuka cabang Kopontren Mambaus Sholihin II yang beroperasi di Desa Betoyo Manyar Gresik sejak tahun 1999.

*Ketiga*, Pabrik Tahu dan Tempe. Usaha ini dimulai pada tahun 2002 dan bermula dari inisiatif pimpinan pesantren guna memenuhi kebutuhan lauk-pauk di dapur umum santri.

*Keempat*, Peternakan Sapi. Usaha ini dimulai pada tahun 2002 dan diawali dari bantuan Menteri Pertanian dan berkembang sampai sekarang. Jumlah sapi yang ditenakkan saat ini sudah berjumlah 49 ekor.

*Kelima*, Pengelolaan Biogas. Usaha ini dikembangkan untuk memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari peternakan sapi juga untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar yang digunakan oleh dapur umum pesantren dan unit usaha lain. Sehingga pimpinan pesantren berinisiatif mengembangkan pengelolaan limbah ternak menjadi biogas sebagai bahan bakar alternatif guna memenuhi kebutuhan pesantren dan mempetimbangkan faktor ekonomisnya. Usaha pengolahan dimulai Tahun 2008.

*Keenam*, Kebun Jati Emas dan Sengon dimulai pada tahun 2002. Untuk memanfaatkan lahan kosong yang masih luas, baik di pondok induk maupun pondok cabang. Pimpinan pesantren berinovasi untuk

menanam bibit-bibit pohon jati Emas dan Sengon dengan tujuan selain untuk penghijauan lingkungan disekitar pesantren juga faktor ekonomi yang diharapkan dalam jangka waktu kedepan.

*Ketujuh*, percetakan dimulai pada tahun 2002. Usaha ini berangkat dari kebutuhan cetak buku, kitab dan lainnya oleh pesantren, lembaga pendidikan formal dan santri, sehingga mendorong pimpinan pesantren untuk membeli mesin cetak sendiri yang nantinya diharapkan selain untuk memenuhi kebutuhan pesantren sendiri juga dikembangkan sebagai unit bisnis jasa percetakan.

*Kedelapan*, Isi Ulang Air Minum dimulai pada tahun 2004. Melihat potensi air di desa Suci yang berlimpah, pimpinan pesantren menangkap peluang itu dengan mendirikan usaha isi ulang air minum dengan membeli mesin penyaringan air menjadi layak konsumsi, selain untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi santri, guru, karyawan juga usaha ini dimanfaatkan untuk menambah pemasukan keuangan dengan melayani konsumen dari sekitar pesantren.

*Kesembilan*, Usaha Air Kemasan MBS Water. Berangkat dari pengalaman usaha isi ulang air minum, pesantren melihat peluang kebutuhan pasar yang besar terhadap air minum kemasan, sehingga pada tahun 2012 pimpinan pesantren berinisiatif untuk mendirikan usaha dalam bidang ini.

*Kesepuluh*, Pangkas Rambut dimulai Tahun 2005. Usaha ini diinisiasi oleh kebutuhan potong rambut oleh santri yang memang diharuskan selalu menjaga kerapian penampilan, khususnya rambut. Disamping itu, adanya beberapa santri yang memiliki keahlian dari rumah terkait potong rambut.

*Kesebelas*, Laundry mulai tahun 2008. Jumlah santri yang sangat besar dan semakin bertambah tiap tahunnya, memunculkan ide usaha pimpinan pesantren untuk memfasilitasi kebutuhan jasa cuci bagi santri, sehingga mendirikan usaha laundry di pesantren.

*Keduabelas*, Bank Santri "BCM". Demi keamanan dalam hal keuangan di kalangan santri yang begitu besar dan berdasarkan pengalaman kasus-kasus kehilangan uang santri. Pimpinan pesantren melakukan penanggulangan dengan mendirikan bank santri. Bank ini meskipun tidak berorientasi profit, tetapi memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah sana. Tentunya dengan mengadopsi manajemen keuangan shari'ah.

*Ketigabelas*, Toko Kitab, ATK dan Kebutuhan Santri el-Faqih dimulai pada tahun 2001. Usaha ini didirikan untuk memenuhi

kebutuhan kitab, buku dan alat tulis lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal di pesantren juga santri.

*Keenambelas*, ada sekitar 15 kantin santri yang tersebar di asrama santri putri dan putra yang pengelolaannya diserahkan kepada beberapa santri, biasa disebut *khodam*, dimana pemasukan dari hasil keuangan yang didapatkan diperuntukkan untuk keluarga besar pimpinan pesantren. Adapun jajanan atau menu-menu yang dijual di kantin-kantin tersebut adalah produksi dari masyarakat sekitar dan guru-guru yang tinggal di area pesantren.

Dari sekian banyak unit-unit usaha bidang perekonomian yang dimiliki dan dikembangkan oleh PPMS masih dikelola dengan sistem manajemen tradisional, dari wawancara awal yang dilakukan peneliti didapatkan fakta bahwa tidak ada organisasi manajemen yang dibentuk secara khusus untuk mengelola unit-unit usaha perekonomian tersebut, meskipun seperti Dar Syifa', MBS Water dan Travel sudah memiliki organisasi manajemen sendiri tetapi masih tidak terintegrasi dengan organisasi yayasan. Selama ini model manajemen masih terpusat pada kyai, selaku pimpinan pesantren. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pengangkatan penanggung jawab unit usaha, perekrutan karyawan atau disebut *khodam*, penggajian dan pelaporan. Tidak ada upaya-upaya pengembangan yang dilakukan terkait SDM ataupun sistem manajemen yang ada. Bahkan ada beberapa usaha-usaha yang harus gulung tikar disebabkan lemahnya sistem manajemen yang ada.

Untuk itu, dengan pertimbangan kondisi dampingan, peneliti menyimpulkan bahwa PPMS memerlukan upaya-upaya pemberdayaan (*empowering*) untuk mendapatkan sistem manajemen yang tertata dengan baik, sehingga kemandirian pesantren niscaya terwujud di PPMS.

### Dampingan yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan setelah dilakukannya pendampingan dan pemberdayaan pada usaha-usaha dalam bidang perekonomian yang telah dikembangkan oleh PPMS adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sistem manajemen yang mapan dan terkoordinir dengan baik di masing-masing unit usaha bidang perekonomian yang dikelola dan dikembangkan berbasis ekonomi shari'ah.
2. Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam pengelolaan dan manajemen di masing-masing unit usaha.

3. Kemandirian pondok pesantren dalam segi keuangan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu pesantren serta lembaga-lembaga di bawah organisasinya.
4. Terbentuknya sikap kreatif dalam mengembangkan usaha-usaha berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki.
5. Terbentuknya jaringan yang memperkuat basis ekonomi yang dikembangkan.

*Empowering* usaha kreatif untuk mewujudkan kemandirian PPMS dengan mengadopsi ekonomi shari'ah sebagai kekuatan, disamping dimaksudkan untuk menopang kemandirian pesantren, juga menepis anggapan bahwa santri hanya pintar mengaji dan berdoa dapat dijawab dengan bukti nyata. Sebab kemandirian hidup dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan implementasi ajaran Islam yang dikaji di pesantren sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Saw.

*Empowering* usaha kreatif untuk mewujudkan kemandirian PPMS dengan mengadopsi manajemen ekonomi berbasis shari'ah dijalankan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Perbaikan organisasi dan manajemen usaha-usaha perekonomian di PPMS menuju pengelolaan yang profesional dan berbasis shari'ah. Hal ini dilakukan dengan cara membuka kesadaran stakeholders melalui pemaparan data dan diskusi untuk membentuk sikap yang mengarah kepada perubahan yang lebih baik terkait organisasi dan manajemen lembaga perekonomian di PPMS.
2. Perbaikan sumber daya manusia yang terlibat di dalam pengelolaan usaha-usaha perekonomian di PPMS yang bertujuan meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku dan pengembang usaha. Langkah ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan, diskusi kelompok stakeholders dan media lain yang bekerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dan alumni yang sudah memiliki pengalaman di dalam manajemen dan akuntansi.
3. Penguatan lembaga keuangan yang dapat menopang pengelolaan dan pengembangan sekaligus meningkatkan *income* dan kesejahteraan pesantren, usaha-usaha perekonomian dan lembaga-lembaga lain di bawah organisasi PPMS dengan memaksimalkan peran dan fungsi Koperasi Pesantren yang bisa dikembangkan dengan cara menambah pruduk layanan seperti *Baitul Mal wa*

*Tamwil* (BMT) dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan.

4. Menumbuhkan kreatifitas dalam mengembangkan usaha-usaha dalam bidang perekonomian berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki PPMS. Langkah ini dilakukan dengan cara memberikan wawasan tentang pondok-pondok yang sudah mengembangkan perekonomiannya.
5. Membangun jaringan, baik dengan alumni, masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dilakukan dengan menjalin komunikasi dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan memperkuat jaringan pemasaran melalui memaksimalkan peran organisasi alumni.

### Strategi Pemberdayaan

Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal baru. Upaya pengembangan masyarakat terutama dilandasi oleh ajaran keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, dan kebudayaan tradisional seperti semangat gotong-royong. Pengembangan masyarakat pada masa lalu erat hubungannya dengan memperjuangkan kemerdekaan, pada saat ini kegiatan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada partisipasi pembangunan dalam konteks transformasi sosial.

Korten, dalam I. N Sumaryadi, mengemukakan bahwa strategi program pengembangan masyarakat berorientasi pada pembangunan yang tercermin dalam empat generasi, yaitu:

Pertama, generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yang diperuntukkan sesegera mungkin dapat memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu dan/atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Kedua, generasi yang memusatkan kegiatannya pada *small-scale reliant local development* atau disebut dengan *community development*, pada segmen ini antara lain meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, penyelesaian persoalan masyarakat bawah (*grassroot*) tidak dapat diselesaikan dengan hanya pendekatan *top-down approach*, melainkan membutuhkan pendekatan *bottom up approach*.

Ketiga, generasi dimana semua sumber daya manusia dan potensi yang ada harus terlibat dalam *sustainable sistem development*, yakni mulai memperhatikan dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh ke daerah lain, baik tingkat regional, nasional, dan internasional. Pada



tahap ini terdapat upaya untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunan. Strategi ini mengharapkan perubahan pada tingkat regional dan nasional.

Keempat, generasi yang berperan sebagai fasilitator gerakan masyarakat (*people movement*). Peran pada generasi ini membantu agar rakyat mampu mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka. Generasi ini tidak sekedar hanya mempengaruhi perumusan kebijakan saja, namun mengharapkan adanya perubahan dalam pelaksanaannya.

Ismawan dalam I. N Sumaryadi, mengemukakan lima strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu; (1) program pengembangan sumber daya manusia, (2) program pengembangan kelembagaan lokal, (3) program pemupukan modal swasta, (4) program pengembangan usaha produktif, dan (5) program penyediaan informasi tepat guna.

#### Potensi Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Shari'ah

Pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, layak untuk menjadi lokomotif ekonomi shari'ah. Disisi lain perkembangan ekonomi shari'ah di Indonesia juga sangat memerlukan peran pesantren. Pesantren memiliki ciri khas tersendiri ketimbang lembaga pendidikan lain di Negara manapun selain di Indonesia. Keberadaan pesantren juga diyakini dapat membantu pengembangan ekonomi masyarakat dan ekonomi shari'ah. Pasalnya, pesantren dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi shari'ah di masyarakat.

Sesjumlah pesantren sejak lama telah berperan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat dengan mengembangkan aneka bisnis, baik berskala mikro, kecil, dan menengah meliputi bidang usaha produktif yang menjadikan pesantren semakin memiliki kemandirian dalam menjalankan keseluruhan kiprahnya. Pengembangan bidang ekonomi ini biasanya bergantung pada potensi ekonomi internal dan eksternal yang ada di lingkungan pesantren. Beberapa ciri khas pesantren diantaranya; pesantren menyatu dengan kehidupan masyarakat kegiatan pesantren selalu melibatkan masyarakat sekitar, pesantren merupakan milik masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat Terdapat empat alasan untuk mengungkap potensi

pesantren dalam menggerakkan perkembangan ekonomi shari'ah di masyarakat, yaitu:

1. Pesantren sejak lama telah lama berperan dalam bidang perekonomian.
2. Setiap pesantren pada dasarnya mempunyai pelanggan tetap (*captive market*) yang khas.
3. Pesantren di mana pun keberadaannya mempunyai *magnet in heren* bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia.
4. Praktik-praktik perekonomian shari'ah pada hakikatnya merupakan khazanah kekayaan pesantren.
5. Tanggapan dan resistensi masyarakat Indonesia terhadap perkembangan ekonomi Islam kiranya sangat jauh berbeda dengan wacana politik Islam. Perbedaan tanggapan dan resistensi ini terletak bahwa politik Islam membawa konsekuensi yang sangat jauh dalam kaitannya dengan sistem politik dan kenegaraan Republik ini. Sebaliknya, ekonomi Islam hanya dilihat dari aspek bahwa ekonomi Islam menjanjikan solusi nyata bagi aneka persoalan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi, pengangguran dan lain-lain. Benarkah praktik ekonomi Islam lebih menguntungkan dibanding praktik.

Sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan, pesantren telah terbukti menjadi barometer pertahanan moralitas umat Islam yang mampu melakukan perubahan masyarakat di lingkungannya ke arah transformasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Pesantren juga merupakan lembaga yang mengerti dan memahai terhadap perubahan dan tantangan sosial masyarakat baik pada konteks lokal, nasional maupun global.

Budaya pesantren yang menekankan kesetaraan, kerakyatan dan keadilan, telah melahirkan suatu perubahan masyarakat menjadi modern, namun tetap berpijak pada landasan tradisionalitas dan moralitas. Pesantren telah menciptakan kemajemukan dan kedinamisan sebagai sebuah lembaga multi fungsi yang melibatkan kiai, santri, ustadz, masyarakat, dan pemerintah. Dari identitas dan dinamisasi itulah, maka pesantren dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi bahkan politik.

Secara kelembagaan, pesantren di Indonesia memiliki kekuatan bertahan hidup yang luar biasa, sejak dahulu kala hingga kini. Di Turki, model pendidikan sejenis pesantren tidak dapat bertahan lama karena pembaharuan pendidikan Islam dilakukan dengan mengganti

100% model pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan umum yang diadopsi dari Eropa. Demikian pula yang terjadi di Mesir, yang awalnya menyandingkan model pendidikan umum dengan pendidikan tradisional. Namun, dalam perkembangannya model pendidikan umum semakin menguat dan memposisikan pendidikan madrasah dan *kuutab* sebagai pelengkap meski sistem ini akhirnya dihapuskan.

Pesantren di Indonesia dengan identitas, proses pendidikan dan pengajaran serta transformasinya yang khas telah memfungsikan dirinya sebagai lembaga pendidikan multi dimensi. Dalam prosesnya, pendidikan dan pengajaran keilmuan keislaman merupakan fungsi dasar yang paling utama. Kemudian dikembangkan pada fungsi-fungsi lainnya yang mendukung terhadap pusat pengembangan dan penyebaran misi dan dakwah Islamiyah dalam pengertian luas. Melalui pesantren, syiar-syiar Islam disosialisasikan melalui berbagai metode dan kegiatan-kegiatan nyata di masyarakat Pondok pesantren secara kultural dapat dipetakan berdasar ciri-ciri khas yang dipunyainya dalam menjalankan kiprah dan fungsinya. Termasuk ketika, pesantren melakukan perubahan orientasi dalam kegiatan-kegiatannya. Secara umum, pondok pesantren di Indonesia dapat dipetakan menjadi tiga tipe berdasar proses pendidikan dan pengajarannya:

*Pertama, pesantren tradisional.* Model pesantren ini mempunyai ciri khas yaitu pesantren yang dalam proses pengajarannya menjadikan masjid atau langgar (*mushalla*) sebagai unsure utamanya. Pertemuan kiai dengan santri dilakukan secara teratur, dengan sistem *halaqah* yang dilakukan bakda shalat subuh, zuhur, ashar, maghrib dan isya. Pola pendidikan pesantren ini belum dipadukan dengan sistem pendidikan madrasah yang menggunakan kurikulum tertentu.

*Kedua, pesantren moderen.* Pondok pesantren ini merupakan pengembangan dari tipologi pesantren tradisional. Pesantren model ini ditengarai oleh semakin lengkapnya komponen-komponen pesantren yang tidak lagi sebatas pada rumah kiai dan masjid atau langgar, melainkan komponen lainnya yaitu asrama santri, dan kelas-kelas untuk belajar. Penerapan sistem pengajaran pondok tidak lagi berpusat di masjid, melainkan menggunakan ruang kelas, baik dalam bentuk madrasah *diniyah*, madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah maupun *Ma'had Aly*. Dalam sistem pesantren ini dikenal pembagian kelas berdasar tingkat dan materi pendidikan yang diajarkan seperti kelas dasar (*marhalah ulâ*), kelas menengah (*marhalah wusthâ*) dan kelas atas (*marhalah ulyâ*), baik dengan kurikulum mandiri ayau gabungan

antara kurikulum pesantren dengan kurikulum madrasah secara nasional.

*Ketiga, pesantren terpadu.* Tipologi pesantren ini merupakan pesantren yang dalam sistem pendidikan dan pengajarannya memadukan antara system pendidikan pesantren tradisional dan sistem pendidikan pesantren modern. Dalam pesantren ini diajarkan kitab-kitab kuning dengan menggunakan system *halaqah*, *bandongan* dan *klasikal* tetapi di samping itu, diterapkan pula system sekolah dan berbagai pendidikan keterampilan khusus.

Agar dapat menjawab tantangan zaman, pesantren melakukan diverifikasi peran, yaitu tidak hanya mengembangkan aspek kognitif leilmuan, tetapi juga aspek psikomotorik keahlian kecakapan hidup (*life skills*). Sebetulnya aspek pendidikan kecakapan hidup telah menjadi budaya pesantren. Hal ini dibuktikan dengan alumni-alumni pesantren yang mempunyai capaian kemandirian dalam bidang sosial ekonomi. Demikian pula bukti banyaknya kiai yang ahli ilmu keislaman sekaligus juga ahli berbisnis sebagai wirausaha. Sayangnya, pengembangan keahlian kecakapan hidup ini belum menjadi ciri khas pesantren pada umumnya dan belum ditransformasikan kepada para santri secara kelembagaan atau keorganisasian.

Atas dasar itulah, pengembangan program-program *short course life skill* yang diusung Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dimaksudkan untuk, *pertama*, memberikan berbagai keterampilan dan keahlian kepada santri putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, memperluas akses dan kesempatan bagi santri untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil/ahli pada bidang tertentu yang dibutuhkan dunia industri. *Ketiga*, memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pondok pesantren dapat berperan luas dan dinamis baik melalui jalur formal maupun informal. Kini banyak pesantren yang telah terlibat dalam pengembangan sektor perekonomian seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, pertokoan, koperasi, BMT dan *home industry*.

Diantara pesantren yang mulai melakukan transformasi tersebut adalah Pesantren Agribisnis al-Ittifaq di Ciwidey Bandung telah berhasil menjadi pesantren penghasil aneka sayur-mayur dan setiap hari memasoknya ke berbagai super market di Bandung, Bogor, Depok dan Jakarta. Pesantren ini pun melibatkan seluruh santri dalam

proses produksinya dan tidak memungut biaya atas seluruh biaya pendidikan di pesantren. Demikian pula dengan pesantren Madinatun Najah Pebayuran Bekasi. Pesantren ini sengaja didirikan oleh KH Mahrus Amin di atas tanah wakaf dari pengusaha H Yasin sebagai pesantren agribisnis. Santri di sini disiapkan untuk dapat terjun di dunia agribisnis. Pada bulan Maret 2007 atas kerja sama dengan ICMI berhasil melakukan panen raya atas 235 Ha tanpa pestisida. Hasilnya dijual setelah memenuhi kebutuhan pesantren. Demikian pula mangga dan Ratusan pohon yang mengitari areal pesantren.

Selanjutnya, Pesantren al-Amin Preduan Sumenep telah berhasil mengembangkan usaha bahari dengan produk berbagai aneka industri ikan laut yang dilakukan melalui usaha mandiri dan kerja sama dengan masyarakat nelayan dan juga para alumni yang sudah berhasil sebagai pengusaha pengolahan ikan laut. Pesantren ar-Risalah Ciamis Jawa Barat, secara khusus mengembangkan usaha perikanan yaitu ikan gurame dan lain-lain. Hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Ciamis, Tasikmalaya dan sekitarnya. Pesantren ini didirikan secara *unik*. Diakui oleh pendirinya, sebelum membangun pondok pesantren yang lebih dahulu dibuat adalah kolam-kolam ikan di areal rencana pembangunan masjid, asrama santri, rumah pengasuh dan lain-lain. Dengan demikian yang didirikan adalah unit-unit usaha perekonomian terlebih dahulu, baru setelah berhasil dan ber-*income* banyak pesantren didirikan di lokasi itu. Dengan demikian hasil budidaya ikan dan usaha-usah ekonomi lainnya, digunakan untuk menutupi kebutuhan keseharian pesantren dan santri-santrinya.

Demikian pula pesantren Sidogiri Pasuruan, telah berhasil melakukan pengembangan aneka usaha hingga mempunyai aset 15 milyar di bawah koordinasi Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. aset ini disumbang melalui usaha-usaha percetakan, aneka pertokoan seperti buku, toko kelontong dan sembako, mini market, usaha pembuatan sarung dan busana Muslim, produksi air minum mineral merk santri yang produksi perbulannya telah mencapai 25.000 pak atau 1.000.000 gelas. Aset ini belum termasuk BMT yang telah mencapai 20 Milyar.

Berpijak pada berbagai potensi ekonomi yang dimiliki dan sebagian sudah dikembangkan oleh berbagai pondok pesantren. Maka menggerakkan sistem ekonomi shari'ah sangat tepat dilakukan dari pesantren. Sebagai bisnis fundamental, ekonomi shari'ah yang dekat dengan aktifitas perekonomian masyarakat, lembaga keuangan mikro

shari'ah atau koperasi BMT sangat cocok dikembangkan di pesantren. Beberapa alasan riil dapat dikemukakan sebagai berikut:

*Pertama*, pesantren memiliki santri baik siswa sekaligus santri maupun santri murni yang pada waktu-waktu tertentu melakukan pembayaran untuk membantu biaya operasional pesantren sebagaimana SPP di sekolah-sekolah umum. Jumlah santri merupakan pasar potensial dana pihak ketiga bagi BMT melalui simpanan atau tabungan. Realitas demikian, sangat potensial bila dikelola Baitul Mal Watamwil (BMT).

*Kedua*, setiap pesantren memiliki pasar fanatik (*captive market*), yaitu santri, ustadz dan masyarakat di lingkungan pesantren. "Pasar" ini sangat potensial untuk berbagai sektor usaha riil seperti kantin, toko serba ada untuk kebutuhan sehari-hari, toko buku dan lain-lain. Aneka usaha ini dapat dikembangkan secara terpadu di bawah naungan koperasi BMT sebagai sector riilnya.

*Ketiga*, jaringan santri, orang tua santri yang memiliki aneka usaha, aneka pekerjaan dan berbagai latar belakang yang telah terjalin sebagai ikatan orang tua wali santri sangat potensial sebagai jaringan pemasaran BMT dan sektor riil yang dikembangkan oleh pesantren. Adanya hubungan emosional yang mengikat antar orang tua, masyarakat dan pesantren dapat diarahkan ke arah pengembangan bidang ekonomi untuk memajukan pesantren.

Ketiga alasan di atas baru sebatas potensi umum yang telah dimiliki oleh hampir semua pesantren dan belum meliputi potensi-potensi ekonomi yang khas yang ada lingkungan internal setiap pesantren dan belum termasuk potensipotensi ekonomi di lingkungan pesantren yang pasti berbeda-beda. Pada dasarnya pengembangan amal usaha ekonomi pesantren harus dimulai dari potensi ekonomi yang ada di lingkungan internal pesantren dan setelah solid baru dikembangkan untuk menjangkau potensi di lingkungan sekitar pesantren.

Pengembangan bidang ekonomi pondok pesantren dimaksudkan untuk menopang kemandirian pesantren secara kelembagaan pada satu sisi dan menyiapkan kecakapan hidup bagi para santrinya. Kesan bahwa santri hanya pintar mengaji dan berdoa dengan pengembangan bidang ekonomi dapat dijawab dengan bukti nyata. Kemandirian hidup dalam bidang ekonomi pada dasarnya merupakan implementasi ajaran agama Islam dan pesantren mengajarkan ajaran-ajaran Quran dan hadist. Quran secara tegas melarang umat Islam

meninggalkan anak cucu dalam kondisi yang lemah termasuk lemah secara ekonomi. Demikian pula mengancam secara tegas terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman dalam praktik perekonomian. Dengan demikian meyiapkan generasi mandiri secara sosial ekonomi dan berdaya saing tinggi dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama merupakan keharusan bagi setiap orang termasuk bagi lembaga pendidikan seperti pesantren.

Pada umumnya pesantren dapat mempertahankan proses pendidikannya bertumpu pada dana sosial kemasyarakatan. Dana ini dapat berasal dari infak, shadaqah bahkan zakat. Dengan demikian, muncul pemahaman bahwa pesantren merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang layak untuk dibantu dan didukung oleh kaum Muslimin. Memang dalam hal ini tidak ada yang keliru, tetapi tidak jarang pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu, dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan masjid, pesantren, madrasah dan lain-lain.

Kemandirian pesantren, termasuk di dalamnya pembangunan kemandirian santri sesungguhnya telah memiliki sejarah yang kuat di dunia pesantren. Menurut Azyumardi Azra dalam Nurcholis Majid (2004) sejumlah pesantren telah membiasakan model pendidikan keterampilan yang menyatu dalam pendidikan pesantren. Pada masa kesulitan ekonomi yang di hadapi bangsa Indonesia pada dekade 1950-an dan awal 1960-an pembaharuan pesantren banyak diarahkan kepada pemberian pelatihan keterampilan khususnya dalam bidang pertanian yang ditujukan sebagai bekal santri disamping untuk menopang ekonomi pesantren. Pilihan ini sangat logis sebagai jawaban tuntutan untuk *self supporting* dan *self financing*. Di antara pesantren yang aktif dalam bidang pengembangan ekonomi pertanian pada era ini adalah pesantren Tebuireng dan Rejoso yang melibatkan para santri dalam budidaya penanaman padi, kelapa, tembakau dan kopi. Kemudian pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Denanyar, Tambak beras, dan Tegalrejo mendirikan dan mengembangkan koperasi. Melalui koperasi inilah program pengembangan ekonomi pesantren dilakukan secara berkesinambungan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Sayangnya, model pengembangan ekonomi pesantren demikian, hingga kini belum menjadi alat vital yang utama atau proses yang menyatu bagi pesantren kebanyakan. Pada umumnya pesantren

dengan ciri khas kesederhanaannya, lebih berpedoman kepada prinsip "lillahi ta'ala" dalam pengertian sempit. Tujuan utama, pesantren adalah mendidik moralitas sentry melalui pengajaran dan pendidikan keilmuan keislaman. Sedangkan urusan ekonomi merupakan urusan *fardhu kifayah*. Konsekuensi atas pemahaman sempit *fardhu kifayah* ini menyebabkan tidak sedikit di antara pesantren yang merasa cukup diri dengan kondisi serba sederhana dan menjauhkan diri dari aktivitas perekonomian. Realitas dan karena alasan-alasan itulah kiranya mengapa hanya sejumlah kecil pesantren yang memilih melakukan pengembangan ekonomi pesantren sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran pesantren.

Pada kesaharian ini, merupakan hal yang tidak sulit dijumpai, sekelompok orang atau individu-individu yang berkeliling dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor dari satu kota ke satu kota yang lain dengan membawa proposal dan list sumbangan untuk dana pembangunan masjid, pesantren atau madrasah. Bahkan pada dekade 2000-an sampai kini muncul hampir di setiap daerah sekelompok orang, dengan alat pengeras suara, drum-drum yang di tempatkan di tengah jalan raya dan alat untuk menangkap ikan, menghampiri para pengguna jalan untuk meminta infak guna pembangunan masjid, atau pesantren dan lain-lain. Adapula yang sengaja berkeliling dari kota ke kota lainnya dengan kendaraan yang dilengkapi alat pengeras suara dan beberapa tenaga beratribut santri berkeliling meminta-minta infak guna pembangunan pesantren atau madrasah. Dari situlah kemudian muncul kesan bahwa pesantren atau lembaga-lembaha keagamaan Islam kerjanya hanya bergantung dan meminta-minta. Kondisi ini jelas tidak baik dan tidak mendidik bahkan menjatuhkan harga diri umat Islam sendiri. Meskipun benar bahwa infak untuk masjid merupakan perbuatan mulia, tapi cara-cara demikian tidak sesuai dengan hakikat ajaran Islam sendiri yaitu memberi lebih baik dari pada meminta. Masih banyak cara-cara yang lebih elegan dan terhormat serta dapat menghasilkan dana yang tidak sedikit.

Ketergantungan lembaga-lembaha keagamaan Islam demikian, terlihat pula pada aspek politik. Terutama pada masa kejayaan partai Politik Golkar di masa Orde Baru, muncul identitas pesantren-pesantren pendukung partai pohon beringin dikarenakan bantuan-bantuan dari pemerintah yang diatasmakan partai. Karena itu tidak jarang antar pimpinan pondok pesantren satu dengan yang lainnya berbeda pendapat bahkan berselisih secara tajam hanya karena

problem perbedaan kepentingan politik. Terplesetnya pesantren ke dalam aura wilayah kepentingan politik ini telah menjadikan kemandirian pesantren menjadi ternodai. Etos ekonomi dan bisnis pada dasarnya merupakan pelajaran pertama yang diperankan Nabi Muhammad sejak usia belia dalam mengemban misi kenabiannya. Bagaimana beliau mulai belajar kegiatan ekonomi sektor riil dalam bimbingan dan pengawasan pelaku bisnis berpengalaman, yaitu Abu Thalib. Setelah siap melakukannya secara mandiri, Nabi Muhammad kemudian diarahkan untuk melakukan kegiatan bisnis yaitu bekerja sama dengan Siti Khadijah yang kemudian justru memilihnya sebagai pendamping hidup. Rasulullah melakukan cara-cara bisnis dengan ramah, jujur, saling menguntungkan. Apabila terdapat kecacatan dalam suatu barang, disebutkan apa adanya. Demikian pula, menekankan pentingnya kemitraan dan silaturahmi. Berbeda dengan kebiasaan para saudagar Qurasy yang hanya menekankan keuntungan sebagai satu-satunya tolok ukur, walaupun harus dicapai dengan cara-cara yang merugikan pihak lain atau konsumen. Sketsa hal ini, jelas tergambar dalam Quran surat al-Muthoffin, 83: 2-3, yaitu kebiasaan menyempurnakan takaran atau timbangan ketika mereka membeli, tetapi sengaja mengurangi ketika menjualnya kembali.

Nabi Muhammad menjalankan kegiatan ekonomi produktifnya dengan dua kategori keahlian, seperti juga yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika diangkat menjadi Bendaharawan Negara. *Pertama*, memiliki kemampuan sebagai penjaga, agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan, misalnya manajemen dan lain-lain. Artinya, memiliki kemampuan sebagai pengelola dan pengembangan. Sedangkan kategori keahlian *kedua*, yaitu memiliki keilmuan dan keluasan wawasan tentang sistem dan mekanisme ekonomi sehingga kegiatan usahanya dapat berkembang dengan sukses.

Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara di Madinah, Nabi menciptakan suatu unsur ekonomi yang baik. Penawaran dan permintaan pasar diarahkan agar seimbang secara alami. Siapapun boleh masuk ke pasar dan tidak boleh ada yang menguasai komoditas tertentu sehingga dapat memainkan harga. Demikian pula praktik penimbunan dan monopoli sangat dilarang. Praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti transaksi yang mengandung unsur penipuan, kesamaran, riba, judi, ketidak-pastian, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap dikikis dengan kebijakan politik. Nabi

memberlakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang mempergunakan standar timbangan yang tidak terlisensi.

Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara di Madinah, Nabi menciptakan suatu unsur ekonomi yang baik. Penawaran dan permintaan pasar diarahkan agar seimbang secara alami. Siapapun boleh masuk ke pasar dan tidak boleh ada yang menguasai komoditas tertentu sehingga dapat memainkan harga. Demikian pula praktik penimbunan dan monopoli sangat dilarang. Praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti transaksi yang mengandung unsur penipuan, kesamaran, riba, judi, ketidak-pastian, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap dikikis dengan kebijakan politik. Nabi memberlakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang mempergunakan standar timbangan yang tidak terlisensi.

#### Potensi Ekonomi yang Dimiliki Pondok Pesantren Mambaus Sholihin

Selain memiliki potensi dalam bidang pengembangan keilmuan melalui program-program pendidikan, pondok pesantren juga salah satu institusi sosial yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar dan sampai saat ini masih belum dimaksimalkan. Keadaan seperti ini juga terlihat pada Pondok Pesantren Mambaus Sholihin (PPMS) Gresik. Oleh karena itu penguatan ekonomi pondok pesantren diyakini dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat pesantren (Pengurus Yayasan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Karyawan dan Santri), juga masyarakat di sekitar PPMS, baik di sekitar bangunan pondok pesantren maupun di wilayah yang lebih luas lagi, dimana PPMS tersebut berada. Jika gerakan ini membesar, maka akan mampu menciptakan kantong-kantong penggerak ekonomi masyarakat yang secara otomatis dapat mengurangi kemiskinan di Gresik dan Jawa Timur bahkan secara nasional. Berdasarkan data lapangan penelitian ini, usaha ekonomi yang dilakukan pesantren Mambaus Sholihin pada umumnya menyangkut empat hal pokok, yaitu: (a). Pendidikan dan kesehatan; (b). Perikanan dan peternakan; (c). Koperasi; dan (d). Jasa dan Retail

Adapun rincian usaha-usaha yang dikembangkan di Mambaus Sholihin sebagai berikut: 1) KoponTren Mambaus Sholihin, 2) Klinik Dar Syifa', 3) Peternakan Sapi, 4) Peternakan Ayam, 5) Pabrik Tahu, 6) Budidaya Lele dan Ikan Gurami 7) Potong Rambut, 8) Laundry, 9) Toko El-Faqih, 10) Bank Santri "BCM" 11) Radio, 12) Kantin, 13)

Percetakan, 14) Air Kemasan MBS Water, 15) MBS Travel.

Selain potensi-potensi usaha bidang perekonomian yang sudah dimiliki, PPMS memiliki prospek pasar yang besar jika dilihat dari kuantitas santri, tenaga pendidik dan kependidikan, karyawan dan alumni. Berdasarkan data dalam pertemuan wali santri tahun 2015, jumlah potensi pasar tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Jumlah santri: 5512 Orang, Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta karyawan: 522 Orang, Jumlah Alumni: Lebih dari 20.000 Orang

Jadi dari kuantitas santri, tenaga dan alumni yang sangat besar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPMS memiliki prospek pasar yang bisa dimanfaatkan, tentunya dengan strategi manajemen *networking* yang baik.

Apabila ketiga pilar yang sudah digambarkan oleh peneliti untuk *mapping* kekuatan ekonomi di PPMS, maka peneliti merasa yakin ada peluang pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian PPMS dalam bidang perekonomian dengan upaya *empowering* usaha kreatif bidang perekonomian yang telah dan akan dikembangkan oleh PPMS. Adapun standar manajemen yang dijadikan pijakan adalah sistem ekonomi berbasis shari'ah.

Selanjutnya, dari hasil pengamatan, komunikasi dan *sharing* dengan subjek penelitian ditemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dan diverifikasi oleh peneliti terkait usaha-usaha dalam bidang ekonomi berbasis shari'ah yang sudah dikembangkan di Mambaus Sholihin sebagai berikut:

1. Tidak terdapatnya sistem dan organisasi manajemen berbasis shari'ah yang dibentuk dan dikembangkan dalam wujud satu atap untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha dalam bidang ekonomi di PPMS. Sehingga ini menyebabkan unit-unit usaha yang sudah dirintis kurang bisa dikordinasikan, masih berkesan pengelolaannya masing-masing menurut orang yang ditugasi.
2. Tata kelola di masing-masing unit usaha masih mengadopsi manajemen tradisional ala pesantren. Aktor primernya masih terpusat pada kiai sebagai pengasuh, tentu dengan tanggung jawab yang besar dan luas hal ini akan tambah memberatkan pengasuh pesantren, kiai tidak hanya memikirkan keberlangsungan proses pembelajaran, tapi juga perekonomiannya.
3. Sumber daya manusia yang terlibat di dalam usaha-usaha perekonomian di Mambaus Sholihin masih terbilang belum

terampil, faktor ini lebih disebabkan masih minimnya kegiatan-kegiatan pelatihan yang mengarah pada profesionalisme kerja.

4. Belum maksimalnya fungsi koperasi yang dimiliki pesantren sebagai penopang pendanaan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha-usaha di Mambaus Sholihin. Memang, bagi pesantren salaf kehati-hatian dalam menerapkan sistem ekonomi Islam yang dewasa ini dikenal menjadi salah satu faktor yang didapati di dalam PPMS.
5. Lemahnya pengelolaan jaringan yang dimiliki, baik yang melibatkan alumni, masyarakat dan pemerintah. Ini dikarenakan tidak ada sistem yang menjadi media untuk mengelola jejaring, utamanya alumni juga belum adanya badan khusus atau lembaga yang menjadi pengembangan jejaring. Organisasi alumni, selama ini kurang kiprahnya dalam mengelola jejaring yang dimiliki pesantren dalam bidang ekonomi, lebih pada akomodasi ranah kultural.

Dari masalah-masalah yang sudah dilakukan verifikasi oleh tim peneliti, kemudian dikonsultasikan dan dilakukan jajak pendapat kepada *stakeholders* PPMS. Dari hasil konsultasi dan jajak pendapat peneliti melalui rapat, tim peneliti merancang aksi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dalam bentuk tabel berikut ini:

Masalah	Aksi	Perubahan yang diharapkan
Tidak terdapatnya sistem dan organisasi manajemen berbasis shari'ah yang dibentuk dan dikembangkan dalam wujud satu atap untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha dalam bidang ekonomi di PPMS	Pelatihan bertema " <i>Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Shari'ah</i> " yang diadakan bekerjasama dengan Himpunan Alumni Mambaus Sholihin (HAMAM) Pusat	Pelatihan: Terbentuknya kesadaran <i>stakeholders</i> terkait pengembangan ekonomi pesantren berbasis shari'ah <i>Mapping</i> potensi-potensi perekonomian PPMS Rekomendasi rencana strategis dalam pengembangan melalui pembentukan BUMPPMS (Badan Usaha Milik Pesantren Mambaus Sholihin) dan <i>team work</i> pendirian dan pengembangan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

<p>Tata kelola di masing-masing unit usaha masih mengadopsi manajemen tradisional ala pesantren. Aktor primernya msih terpusat pada kiai sebagai pengasuh, tentu dengan tanggung jawab yang besar dan luas hal ini akan tambah memberatkan pengasuh pesantren, kiai tidak hanya memikirkan keberlangsungan proses pembelajaran, tapi juga perekonomiannya.</p>	<p>FGD: restrukturisasi organisasi usaha perekonomian melalui pembinaan dengan memfasilitasi Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Mambaus Sholihin</p>	<p>Mambaus Sholihin Terbentuknya struktur organisasi BUMPPMS dan restrukturisasi tata kelola di masing-masing unit usaha PPMS dalam bidang perekonomian dengan induk organisasinya adalah Kopontren</p>
<p>Sumber daya manusia yang terlibat di dalam usaha-usaha perekonomian di Mambaus Sholihin masih terbilang belum terampil, faktor ini lebih disebabkan masih minimnya kegiatan-kegiatan pelatihan yang mengarah pada profesionalisme kerja.</p>	<p>FGD: pembinaan dengan memfasilitasi Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Mambaus Sholihin sebagai motor penggera pengawasan dan pengembangan usaha bidang perekonomian PPMS</p>	<p>Renstra pengembangan BUMPPMS dan usaha-usaha bidang perekonomian meliputi: SDM dan manajemen</p>
<p>Lemahnya pengelolaan jaringan yang dimiliki, baik yang melibatkan alumni, masyarakat dan pemerintah. Ini dikarenakan tidak ada</p>	<p>FGD: Memfasilitasi konsolidasi jaringan yang melibatkan stakeholders melalui kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan</p>	<p>Terbentuknya kesadaran kolektif peran alumni, swasta dan pemerintah sebagai jaringan yang patut dikembangkan dalam bidang perekonomian</p>

<p>sistem yang menjadi media untuk mengelola jejaring, utamanya alumni juga belum adanya badan khusus atau lembaga yang menajadi pengembangan jejaraing. Organisasi alumni, selama ini kurang kiprahnya dalam mengelola jejaring yang dimiliki pesantren dalam bidang ekonomi, lebih pada akomodasi ranah kultural.</p>	<p>Himpunan Alumni Mambaus Sholihin (HAMAM) Pusat</p>	
---	---	--

**Pemberdayaan Usaha Kreatif Berbasis Ekonomi Sharf'ah di PPMS**

Dari verifikasi masalah-masalah yang didapatkan peneliti, kemudian dirumuskan rencana aksi dalam upaya membantu subjek penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang usaha perekonomian yang sebelumnya sudah ada di pesantren ini. Hal ini disorong oleh kesadaran dari pengasuh, pengurus yayasan dan pengelola unit usaha pesantren untuk berubah ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya melalui *small group discussion* yang melibatkan seluruh *stakeholders*, sehingga strategi ini mampu menjadi dasar tindak lanjut *problem solving* yang dihadapi. *Follow up* tersebut diperinci sebagai berikut:

**BUMP PPMS sebagai *Problem Solving* Masalah Manajemen dan Organisasi**

Setelah melakukan pemetaan masalah yang dihadapi oleh PPMS dalam mengembangkan potensi perekonomian yang sudah dimiliki dan melakukan advokasi melalui FGD, peneliti mengarahkan *stakeholders* untuk melakukan penataan dalam sistem manajemen dan organisasi yang menurut pandangan peneliti masih sangat berkarakter tradisional ala pesantren atau dalam istilahnya *integrated structural*, dimana semua unit atau bidang yang ada dalam pondok pesantren

merupakan bagian tak terpisahkan dengan pondok pesantren. Artinya, semua unit atau bidang dengan berbagai ragam spesifikasi, berada dalam suatu struktur organisasi. Model seperti ini, sebenarnya tidak terlalu bermasalah seandainya masing-masing unit atau bidang memiliki *job description* yang jelas, termasuk hak dan kewenangannya. Sebaliknya, Apabila hal ini tidak dijumpai sementara kendali organisasi berpusat hanya pada satu orang (dan inilah yang banyak terjadi di Ponpes), maka dapat dipastikan bahwa sistem keorganisasian dan kelembagaan tidak bisa berjalan dengan baik. Istilah yang sering kita dengar “semuanya harus mendapat restu sang Kiai”. Inilah problem klasik kelembagaan yang biasanya banyak dijumpai di Ponpes. Meski demikian, Apabila figur Kiai yang demokratis, maka otoritarianisme kelembagaan dapat dihindarkan.

Dalam kasus ini, peneliti menerapkan pendekatan yang intens untuk merubah manajemen tersebut dengan melakukan pelatihan, kemudian *me-follow up* kegiatan ini yang diarahkan dengan membentuk badan khusus dalam organisasi PPMS yang khusus mengurus aset-aset perekonomian yang sudah dimiliki dan berjalan di PPMS, kemudian melakukan pendampingan badan yang sudah terbentuk, yakni Badan Usaha Milik Pesantren Mambaus Sholihin dalam melakukan penataan organisasi di masing-masing unit usaha dan merancang tata kelola (manajemen) dan pengembangan yang berstandar pada prinsip-prinsip shari'ah. Dalam teori Hadari Nawawi dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi secara garis besar dirumuskan: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*Organizing*), 3) pelaksanaan (*Actuating*), 4) penganggaran (*Budgeting*), dan 5) pengawasan (*controlling*). Teori ini yang kemudian menjadi fungsi dan tugas dari BUMPPMS yang ditambahkan dalam fungsi dan tugas pengembangan (*developing*). Kemudian fungsi pengawasan terhadap BUMPPMS dirumuskan menjadi tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan Pesantren (BPKP) yang sebelumnya sudah terbentuk pada tahun 2014 untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan di PPMS.

#### BMT PPMS sebagai *Problem Solving* Pendanaan dan Pengembangan

Melalui aksi pelatihan pengelolaan BMT bekerjasama dengan BMT MUI Kabupaten Gresik, terumuskan di antara stakeholders

yang juga terlibat dalam aksi yang sudah di rancang sebelumnya, ada *opportunity* yang bisa dikembangkan terkait penguatan basis keuangan yang ada di PPMS melalui pendirian BMT. Dalam pendirian BMT, penelitian ini hanya sebatas melakukan pendampingan untuk menuju pendirian BMT dengan membentuk *team work* dan rumuskan strategi pendirian yang dilakukan sebagai *follow up* seminar dan *workshop* yang telah diadakan sebelumnya, kemudian peneliti memberikan investasi program pemberdayaan yang berkelanjutan dengan membangun paradigma kesadaran akan potensi besar yang dimiliki oleh PPMS. Hal ini diputuskan peneliti mengingat waktu yang terbatas dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti sudah mempertimbangkan asas keberlanjutan program ini dengan melibatkan LPPM Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik untuk melanjutkan pendampingan terhadap *teamwork* BMT yang telah dibentuk.

Paling tidak dalam analisa peneliti, ada empat alasan yang dapat dijadikan fondasi dalam pemberdayaan potensi pesantren secara umum dan PPMS dalam kasus yang lebih spesifik untuk menggerakkan dan mengembangkan ekonomi berbasis shari'ah di masyarakat, yaitu:

1. Pesantren sejak lama telah berperan dalam bidang perekonomian.
2. Pesantren pada dasarnya mempunyai kepercayaan (*trust*) dari pelanggan tetap (*captive market*) yang khas, yakni: wali santri, santri dan alumni yang menjadi basis konsumen.
3. Pesantren mempunyai “magnet in heren” bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia.
4. Praktik-peraktik *mu'amalah*, lebih spesifik terkait perekonomian shari'ah pada hakikatnya menajadi domain dan kekayaan pesantren.

Berpijak pada fakta-fakta lapangan yang ditemukan peneliti dan dikuatkan dengan teori-teori yang telah dipaparkan potensi-potensi bidang perekonomian di PPMS yang berbasis pada ekonomi shari'ah sangat tepat dilakukan. Sebagai bisnis fundamental ekonomi shari'ah yang produk-produknya dekat dengan aktifitas masyarakat, lembaga keuangan mikro shari'ah atau BMT sangatlah cocok untuk didirikan dan dikembangkan di PPMS, mengingat sudah berkembang sebelumnya koperasi pesantren PPMS yang pada saat ini sudah berjalan satu dekade dan memilki cabang di wilayah Betoyo, meskipun masih bergerak dalam bidang retail saja. Juga banyaknya usaha-usaha perekonomian lain yang menjadi gambaran jiwa *entrepreneurship* kyai



PPMS yang butuh suntikan dana dan payung manajemen. Maka koperasi pesantren bisa menjadi induk manajemen usaha-usaha tersebut. Sedangkan untuk pengawasan dan pengembangan, dibentuklah BUMPPMS yang langsung di bawah tanggung jawab ketua yayasan juga kontrol dewan shari'ah sebagai dewan penimbang dan pengarah kegiatan perekonomian yang dikelola dan akan dikembangkan tetap dalam rel shari'ah. Jika dirumuskan, alasan riil kebutuhan pendirian BMT di PPMS adalah sebagai berikut:

*Pertama*, PPMS memiliki santri dengan kuantitas yang besar yang dalam waktu tertentu melakukan pembayaran biaya operasional pendidikan formal dan non formal pada masing-masing tingkatan pendidikan. Biaya yang dikeluarkan santri dalam jangka waktu berkala menjadi pasar potensial untuk investasi pihak ketiga bagi BMT melalui simpanan dan tabungan.

*Kedua*, PPMS memiliki pasar fanatik (captive market), yaitu santri, ustadz dan masyarakat di lingkungan PPMS. "Pasar" ini sangat potensial untuk berbagi sektor usaha riil yang sudah dan akan dikembangkan di PPMS secara terpadu di bawah payung manajerial Koperasi Pesantren.

*Ketiga*, jaringan alumni dan keluarga santri PPMS yang memiliki aneka usaha, pekerjaan, profesi dan latar belakang sangat potensial sebagai jaringan pemasaran produk-produk BMT dan sektor riil yang telah dan akan dikembangkan oleh PPMS. Faktor emosional dan kepercayaan terhadap PPMS yang dapat mengikat unsur-unsur tersebut untuk diarahkan ke arah pengembangan bidang ekonomi guna mewujudkan kemandirian PPMS, selanjutnya bisa sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat.

Akhirnya, peneliti sadar bahwa hasil penelitian ini mungkin masih dirasa kurang maksimal. Meskipun peneliti sudah mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki secara maksimal. Maka harapan peneliti sekelumit paparan yang telah disusun menjadi laporan penelitian ini bisa membawa kemanfaatan, bagi peneliti, PPMS, akademisi dan masyarakat umum.

### Penutup

Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam bidang perekonomian memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dengan mengadopsi sistem ekonomi berbasis shari'ah, dimana shari'ah merupakan akar keilmuan dari pesantren itu sendiri. Terkait

usaha kreatif, PPMS telah mengembangkan cukup banyak usaha-usaha dalam bidang perekonomian, diantaranya: 1. KoponTren Mambaus Sholihin, 2. Klinik Dar Syifa', 3. Peternakan Sapi, 4. Peternakan Ayam, 5. Pabrik Tahu, 6. Budidaya Lele dan Ikan Gurami, 7. Toko El-Faqih, 8. Bank Santri "BCM", 9. Radio MBS FM, 10. Kantin Santri, 11. Percetakan, 12. Air Kemasan MBS Water, 13. MBS Travel dan masih banyak potensi besar lain yang sudah dan belum dikembangkan.

Dari upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan peneliti ada perubahan yang signifikan terjadi pada subjek penelitian, yakni PPMS dalam bidang perekonomian. Dalam hal ini peneliti menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Terbentuknya kesadaran kolektif *stakeholders* yang terlibat untuk mengembangkan ekonomi pesantren berbasis shari'ah di PPMS.
2. Tertatanya organisasi manajemen bidang perekonomian di PPMS dengan menjadikan BUMPPMS sebagai struktur organisasi yang berfungsi melakukan 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*Organizing*), 3) pelaksanaan (*Actuating*), 4) penganggaran (*Budgeting*), dan 5) pengawasan (*controlling*), dan 6) pengembangan (*developing*) usaha-usaha PPMS dalam bidang perekonomian dengan pengawasan yayasan dan dewan shari'ah.
3. Meningkatnya fungsi Koperasi Pesantren sebagai payung organisasi unit-unit usaha juga penyokong pendanaan dalam pengelolaan usaha-usaha bidang perekonomian di PPMS dengan upaya dalam jangka dekat mendirikan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Mambaus Sholihin.

Adapun saran yang bisa diberikan peneliti untuk pemberdayaan ke depan adalah peningkatan kreatifitas usaha bidang perekonomian dengan melakukan analisis potensi subjek dampingan melalui pelatihan-pelatihan yang terprogram dengan baik.

### Daftar Rujukan

- Anwar. Idochi. 2003. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan; Teori, Konsep Dan Isu*. Bandung: Alfabeta.
- DEPAG RI. 2000. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: DEPAG RI
- \_\_\_\_\_. 2001. *In Service Training KKM MTS/MI*. Jakarta: PPIM.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: DEPAG RI.

- Farchan, Hamdan & Syarifudin. 2005. *Titik Tengkar Pesantren; Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Haedari, Amin. Ishom El-Saha. 2004. *Manajemen Mutu Terpadu Pesantren Dan Madrasah Jakarta*: Diva Pustaka.
- Margoluis, Richard and Nick Salafsky. *Measures of Success: Designing, Managing and Monitoring Conservation and Development Projects*. 1998. Island Press, Covelo.
- Nawawi. Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi Dalam Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Pidarta. Made. 1990. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sulthon. Khusnuridho. 2006. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Prespektif Global*. Yogyakarta: LaksBangPressindo
- Terry. George R. and Lesile W Rue. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen (alih bahasa (G.A.Ticoalu)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid Zaini. dkk. 1999. *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad, dkk. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Akhary, Mokh Syaiful. 2004. *Kebangkitan Ekonomi Syari'ah di Pesantren*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama.
- Tim Pekapontren. 2004. *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia*. Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI.
- Widodo, Hertanto. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil*. Bandung: Mizan.
- Diana. 1999. *Perencanaan Sosial Negara Berkembang*. Yogyakarta: UGM Press.
- Murtada Mukhtashari. 1995. *Masyarakat dan Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Rukmiyanto, Isbandi. 2001. *Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Ghufron, A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul. DKK. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah, Taufiq. 1996. *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Azizi, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Halim A., et al. 2005. *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Maksum, H. 1999. *Madrasah, Sejarah dan Pengembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmi.
- Qardawi, Yusuf. TT. *Al Hill al Islami Faridhah Islamiah*. Kairo: Bank al-Taqwa.
- SM, Ismail, et al. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang kerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Pesantren Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Tasmara, Toto. 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

#### Sumber Internet

- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/11/06/nelro5-pesantren-belum-mandiri-karena-tak-sadar-potensi>. Diakses pada 29 Oktober 2014.
- <http://www.encycity.co/bukopin-dukung-surabaya-jadi-pusat-pengembangan-ekonomi-shari'ah/>. Diakses pada 29 Oktober 2014.
- <http://www.encycity.co/bi-edukasi-santri-terkait-kemandirian-ekonomi/>. Diakses pada 29 Oktober 2014.
- <http://www.iaei-pusat.org/memberpost/umum/pesantren-berpotensi-kembangkan-ekonomi-shari'ah?language=id>. Diakses pada 29 Oktober 2014.

### Sumber Wawancara

Ali Sodikin. Wawancara. 14 Nopember 2014

Ajmain. Wawancara. 14 Nopember 2014

Muhammad Ma'ruf. Wawancara. 23 Oktober 2014

Mohammad Makinuddin. Wawancara. 23 Oktober 2014

Mohammad Hilaluddin. Wawancara. 23 Oktober 2014

### PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan tulisan konsepsional atau hasil penelitian kajian keislaman yang belum pernah diterbitkan dalam media lain baik cetak maupun *online*.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan spasi 1.5 cm, jenis *font Garamond*, ukuran *font 12*, dan ukuran kertas A4, serta dikirim ke email [jurnal.penelitian@yahoo.com](mailto:jurnal.penelitian@yahoo.com), paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan. Panjang tulisan adalah 20-25 halaman atau 7000-9000 kata.
3. Nama penulis artikel (tanpa gelar, jabatan, atau kepangkatan) dicantumkan disertai dengan nama lembaga tempat bekerja, alamat lembaga tempat bekerja, alamat korespondensi, alamat e-mail, nomor telepon kantor, rumah, atau seluler.
4. Artikel konsepsional meliputi judul, nama dan identitas, abstrak ( $\pm 200$  kata), kata kunci, pendahuluan (masalah dan ruang lingkup), isi atau pembahasan, penutup, dan daftar rujukan.
5. Artikel hasil penelitian meliputi judul, nama dan identitas, abstrak ( $\pm 200$  kata), kata kunci, pendahuluan (masalah dan ruang lingkup), metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, penutup, dan daftar rujukan.
6. Artikel yang memenuhi syarat diseleksi dan diedit oleh penyunting untuk penyeragaman format dan gaya selingkung tanpa mengubah isinya.
7. Penulisan catatan kaki dan daftar rujukan dapat dilihat pada contoh berikut.

#### 7.1. Catatan kaki

<sup>1</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: the Macmillan Press, 1970), 87.

<sup>2</sup> Muhammad Arkûn, *Islâm: al-Akhlâq wa al-Siyâsah* (Beirut: Markaz al-Imâm al-Qawmî, 1990), 172-173.

<sup>3</sup> Abû Bakr b. Aḥmad b. Abi Sahl al-Sarakhsî, *Uṣûl al-Sarakhsî*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 3.

<sup>4</sup> J. Ruska, "Sarakhs", dalam A. J. Wensinck, et al. (ed.), *First Encyclopaedia of Islam*, Vol. 7 (Leiden: E. J. Brill, 1987), 159.

<sup>5</sup> Abbas J. Ali, "Levels of Existence and Motivation in Islam", *Journal of Management History*, Vol. 15, No. 1 (2009), 50-65.

<sup>6</sup> Ahmad Kholish, "Pergeseran Orientasi Ideologi Keagamaan Kaum Priyai: Studi Konversi Paham Abangan-Santri Masyarakat Muslim Blitar" (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 127.